



Wetlands

INTERNATIONAL

Yayasan Lahan Basah (YLBA)

Warta Konservasi Lahan Basah

Vol 27 No. 2, Juni 2019



Dari Redaksi

Salam redaksi,

Lahan basah menawarkan berbagai keunikan dan keindahan alami untuk dinikmati.

Fokus kali ini menyajikan keindahan dan peran penting sebuah Taman Wisata Alam yang dimiliki Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Danau Taliwang atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan Lebo Taliwang. Kawasan lahan basah terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, merupakan sumber kehidupan berbagai biota, terutama berbagai jenis burung air, dan menjadi penyangga bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem sekitarnya. Namun, saat ini Lebo Taliwang hampir 80% permukaan airnya telah tertutupi gulma air. Ancaman lain adalah pendangkalan yang terus bertambah akibat material endapan yang terbawa aliran sungai.

Bagaimana kabar berita lahan basah lainnya, silahkan buka lembar demi lembar warta khusus perlahan-bahasan ini.

Selamat membaca !

Daftar Isi

Fokus Lahan Basah

Lebo Taliwang, Penyangga Kehidupan yang Perlu Pemulihan 3

Konservasi Lahan Basah

Karbon di Hutan *Result Based Payment* dalam REDD+ di Indonesia: Peluang dan Tantangan Penerapannya 4

Berita Lahan Basah

Membangun Bersama Alam, Solusi Berbasis Alam untuk Dunia yang Lebih Aman 6

Melindungi Burung Laut di Pesisir Yogyakarta 8

Persoalan Kelembagaan yang Menangani Subsiden Tanah di Indonesia menjadi Isu Sentral 10

Sepenggal Cerita Program *Building with Nature* Indonesia dari Desa Betahwalang 14

Sayangi dan Lindungi Terumbu Karang 16

Stop Press

Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Kerentanan Pesisir di Kota Serang, Provinsi Banten 17

Flora & Fauna Lahan Basah

Keayaan Burung di Habitat Lahan Basah Tersisa di Jakarta Utara 21

Dokumentasi Perpustakaan

23

DEWAN REDAKSI:

Pembina:

Direktur
Yayasan Lahan Basah
(Wetlands International Indonesia)

Pimpinan Redaksi:

Yus Rusila Noor

Anggota Redaksi:

Mauliyati Nuraini Slamet
Triana

“Artikel yang ditulis oleh para penulis, sepenuhnya merupakan opini yang bersangkutan dan Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isinya”



UCAPAN

TERIMA KASIH DAN UNDANGAN

Kami haturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya khususnya kepada seluruh penulis yang telah secara sukarela berbagi pengetahuan dan pengalaman berharganya untuk dimuat pada majalah ini.

Kami juga mengundang pihak-pihak lain atau siapapun yang berminat untuk menyumbangkan bahan-bahan berupa artikel, hasil pengamatan, kliping, gambar dan foto, untuk dimuat pada majalah ini. Tulisan diharapkan sudah dalam bentuk soft copy, diketik dengan huruf Arial 10 spasi 1,5 maksimal 2 halaman A4 (sudah berikuk foto-foto).

Semua bahan-bahan tersebut termasuk kritik/saran dapat dikirimkan kepada:

Triana - *Publication & Communication*
Yayasan Lahan Basah (Wetlands International)
Jl. Bango No. 11 Bogor 16161
tel: (0251) 8312189
fax./tel.: (0251) 8325755
e-mail: publication@wetlands.or.id

Lebo Taliwang, Penyangga Kehidupan yang Perlu Pemulihan

Tri Endang Wahyuni*

Kota Taliwang merupakan kota yang tidak asing di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota ini merupakan ibukota Kabupaten Sumbawa Barat, yang memiliki perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar kedua di Indonesia, PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Dari Pulau Lombok menuju ke Kota Taliwang kita akan menyeberang selat menggunakan kapal feri dan berlabuh di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam penyeberangan menuju Kota Taliwang ini, kita akan menjumpai sebuah danau dimana salah satu sisinya berada tepat di pinggir jalan raya. Lebo Taliwang, demikian masyarakat setempat menamai danau tersebut. Lebo dalam bahasa setempat berarti rawa atau danau. Berjarak ± 24 kilometer ke arah selatan dari

Pelabuhan Penyeberangan Poto Tano, Lebo Taliwang dapat ditempuh selama lebih kurang 30 menit dari pelabuhan tersebut. Berada di antara perbukitan yang sebagian besar mengering kala kemarau, danau ini seperti oase di tengah keringnya Kabupaten Sumbawa Barat.

Lebo Taliwang merupakan sebuah kawasan konservasi dengan status sebagai taman wisata alam, diperuntukkan bagi wisata alam dan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar. Selain itu juga berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan bagi masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. Taman Wisata Alam Danau Taliwang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (BKSDA NTB) yang berkedudukan di Mataram, ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah Danau Taliwang berada

pada 3 desa, Desa Meraran Kecamatan Taliwang, Desa Sampir dan Desa Seloto Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Lebo Taliwang dengan luas ± 820 ha terlihat jelas dari jalan raya menuju ke Kota Taliwang. Tampak sebagian besar perairan ditumbuhi oleh tanaman air, baik yang mengambang maupun yang berakar di dasar danau. Tumbuhan yang mengapung didominasi oleh eceng gondok (*Eichornia crassipes*) dan kiambang (*Pistia stratiotes*). Tumbuhan yang daunnya mengapung dan batang serta perakarannya tenggelam didominasi oleh Teratai (*Nelumbium nelumbo*) dan Teratai putih (*Nymphaea alba*). Selain tumbuhan air, dijumpai pula semacam rumput gelagah yang tersebar tidak merata di pinggiran danau.

.....bersambung ke hal 12



Panorama Lebo Taliwang yang mempesona (Foto: Tri Endang W.)

Result Based Payment dalam REDD+ di Indonesia: Peluang dan Tantangan Penerapannya

Iwan Tri Cahyo Wibisono*

Setelah pada tahun 2009 menyatakan komitmen pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% - 41% dari skenario *Business as Usual* (BAU) di tahun 2020, pemerintah Indonesia pada tahun 2015 memperbarui komitmennya menjadi 29% - 41 % di tahun 2030. Dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang dikirim oleh pemerintah Indonesia ke NDC registry-UNFCCC pada tahun 2016, sektor kehutanan diproyeksikan berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon sebesar 17,2% - 23%, di mana program *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest, and Enhancement of Forest Carbon Stocks* (REDD+) merupakan pilar

utama dalam pengurangan emisi GRK. REDD+ merupakan aksi mitigasi di bidang kehutanan yang sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan kebijakan dan insentif positif yang menjadi komponen penting dalam pencapaian target *Nationally Determined Contribution* (NDC).

Dalam menuju pencapaian komitmen yang telah dijanjikan, pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal, antara lain kebijakan moratorium ijin baru di lahan gambut dan hutan primer (*moratorium policy*), kebijakan satu peta atau *one map policy*, pembangunan *Demonstration Activities* (DA), pembuatan Strategi Nasional REDD+,

pengembangan *Forest Reference Emission Level* (FREL), dan beberapa upaya lainnya.

Di tahun 2017, KLHK secara spesifik meletakkan kebijakan dasar dalam rangka implementasi REDD+ di Indonesia. Melalui peraturan menteri LHK no. 70 Tahun 2017, pemerintah memberikan arah dan panduan tentang tata cara pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Peraturan ini secara lugas menyasar berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, lembaga non-pemerintah, kelompok masyarakat, dan organisasi non-profit lainnya yang berbadan hukum untuk dapat terlibat secara aktif dalam program pengurangan emisi nasional melalui pelaksanaan REDD+.



Dalam konteks pengurangan emisi nasional yang akan dihitung untuk keperluan NDC, maka program REDD+ harus dicatat dan didaftarkan ke dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). Sistem ini merupakan sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Selain untuk memastikan transparansi dan keterbukaan informasi, sistem registri juga dimaksudkan untuk menghindari adanya resiko *double counting* atau *double claiming*, terutama bagi program-program yang telah didaftarkan di luar platform nasional, misalnya melalui *voluntary registry* (contoh: *Verified Carbon Standard/ Verra*). Pemerintah juga mengeluarkan Permen LHK No 71 Tahun 2017 yang secara spesifik memberikan panduan dan prosedur dalam penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.

Untuk menunjang operasionalisasi REDD+, dua peraturan lainnya dikeluarkan, yaitu: 1) Permen LHK no 72 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi aksi dan sumber daya pengendalian perubahan iklim; dan 2) Permen LHK no 73 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan dan pelaporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional. Dalam permen terakhir ini, disebutkan bahwa pedoman umum inventarisasi nasional serta pedoman perhitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mengadopsi pedoman *Intergovernmental Panel on Climate Change* Tahun 2006 (2006 IPCC *Guideline for National Greenhouse Gas Inventories*). Di dalam peraturan ini terdapat data aktifitas, faktor emisi, dan faktor serapan, ketiganya merupakan elemen utama dalam penghitungan emisi GRK. Dengan

menambahkan matriks perubahan tutupan lahan (setidaknya antara dua tahun berbeda), maka akan dapat dihitung pengurangan emisi atau besaran penyerapan GRK. Dengan dikeluarkannya empat peraturan sekaligus di tahun 2017 (Permen LHK No 70, 71, 72, dan 73 Tahun 2017) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka lengkap sudah payung instrumen kebijakan dalam menuju pelaksanaan REDD+ secara penuh.

Berbicara mengenai pengurangan emisi melalui REDD+ dalam konteks NDC, ini merupakan hal yang biasa saja. Media massa telah banyak meliputnya sejak tahun 2009 hingga sekarang. Namun yang menjadi sangat menarik adalah bahwa Permen LHK No. 70 Tahun 2017 membuka peluang bagi pelaksana REDD+ untuk mengakses pembayaran berbasis kinerja atau *Result Based Payment* (RBP). RBP sendiri didefinisikan sebagai insentif positif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi yang telah diverifikasi, dan manfaat selain karbon. Pada saat proses registri dilakukan, pelaksana program REDD+ akan diminta memilih dua opsi; sebagai RBP atau Non RBP. Apabila memilih RBP, maka program ini akan diarahkan untuk dapat mengakses pendanaan melalui skema RBP.

Pelaksana REDD+ didorong untuk mengukur dan melaporkan pencapaian pengurangan emisi atas intervensi yang dilakukan melalui program masing-masing paling lama setiap 2 tahun sekali. Hasil perhitungan ini nantinya akan dicek dan diverifikasi oleh pemerintah dan/atau pihak ketiga dalam mencapai angka final hasil pengurangan emisinya. Setelah proses verifikasi selesai, maka akan dilanjutkan dengan proses pembayaran berbasis kinerja, yang dalam hal ini dapat melibatkan Bank Kustodian.

Upaya-upaya yang telah ditempuh pemerintah dalam pengurangan emisi nasional patut mendapatkan apresiasi, mengingat sumber daya hutan Indonesia yang saat ini kondisinya sudah semakin menguatkan. Saat ini hutan Indonesia yang masih tersisa harus dilindungi lewat langkah konkret dan intensif, sementara untuk wilayah yang telah mengalami kerusakan perlu pemulihan kembali. Apresiasi kepada pemerintah juga perlu disematkan, mengingat upaya konservasi-restorasi hutan (barbalut pengurangan emisi GRK) memberikan peluang insentif bagi para pihak melalui skema RBP.

Sebagai penanggung jawab program pengurangan emisi nasional, pemerintah lebih banyak memiliki kesempatan dan peluang untuk mengintensifkan kegiatan konservasi-restorasi, terutama di tingkat provinsi maupun kabupaten. Melalui skema RBP, maka juga akan lebih terbuka kesempatan bagi pemerintah untuk menjalin kolaborasi dengan para pihak untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan di lapangan.

Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan yang selama ini berkecimpung dengan kegiatan konservasi dan restorasi, skema RBP tentunya memberikan peluang untuk dapat lebih mengintensifkan kegiatan yang sedang dilakukan atau menjalankan program baru di tempat lain. Di sisi lain, RBP juga berpotensi besar dalam konteks keberlanjutan program-program konservasi-restorasi yang selama ini dilakukan. Sudah menjadi kenyataan bahwa program atau proyek hanya aktif di masa periode tertentu, umumnya 1 tahun hingga 5 tahun. Setelah periode proyek habis, maka tidak ada lagi dana untuk melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan.

.....bersambung ke hal 20

Membangun Bersama Alam

Solusi Berbasis Alam untuk Dunia yang Lebih Aman

*Yus Rusila Noor**

Kajian Global oleh *Intergovernmental Science-Policy Platform for Biodiversity and Ecological Services (IPBES)* melukiskan gambaran yang mengkhawatirkan terkait dengan penurunan di alam. Kita kehilangan keanekaragaman hayati lebih cepat dibandingkan dengan kondisi sebelumnya dalam sejarah kemanusiaan. Setidaknya satu juta spesies berada dalam risiko – dan kehilangan serta degradasi lahan basah yang terus berlanjut membuatnya menjadi semakin mengkhawatirkan. Perubahan kebijakan yang meningkat nampaknya merupakan respon yang kurang efektif. Isi laporan meminta adanya pendekatan transformatif

mendalam, yang juga merupakan jiwa dari pekerjaan kami.

Lahan basah adalah sistem alami yang menghubungkan bentang terestrial, air tawar, dan lautan. Mereka adalah yang paling mengalami kehilangan, padahal lahan basah sangat penting untuk masyarakat dan alam. Lahan basah adalah rumah dari sejumlah besar spesies dan memiliki nilai penting luar biasa sebagai sumber air alami, menyimpan cadangan karbon terbesar dan juga sebagai penyangga iklim. Sayangnya kita telah kehilangan lahan basah tiga kali lebih cepat dibandingkan dengan hutan. Hal ini kemudian menyebabkan spesies yang bergantung kepada lahan basah mengalami

penurunan yang serius. Laporan IPBES mengingatkan kembali gambaran mengenai penurunan spesies lahan basah di seluruh muka bumi. Ini tentu saja berita yang kurang menyenangkan untuk alam sekaligus manusia, karena kita membutuhkan lahan basah yang sehat untuk dapat menyediakan jasa lingkungan mereka.

“Ekosistem perairan daratan dan air tawar adalah di antara yang paling tinggi laju penurunannya. Hanya 13% lahan basah yang tercatat pada tahun 1700 masih ada pada tahun 2000; kehilangan akhir-akhir ini bahkan lebih cepat (0,8% pada tahun 1970 hingga 2008)” – Laporan IPBES, 2019.



Alam adalah sahabat sejati kita (Foto: Yus Rusila Noor)

“Penurunan populasi seringkali memberikan peringatan bahwa spesies yang berada di ambang kepunahan semakin bertambah. *The Living Planet Index*, yang merupakan sintesis kecenderungan dalam populasi vertebrata, telah menurun secara cepat sejak tahun 1970, menurun 40% untuk spesies terestrial, 84% spesies air tawar dan 35% spesies lautan” – Laporan IPBES 2019.

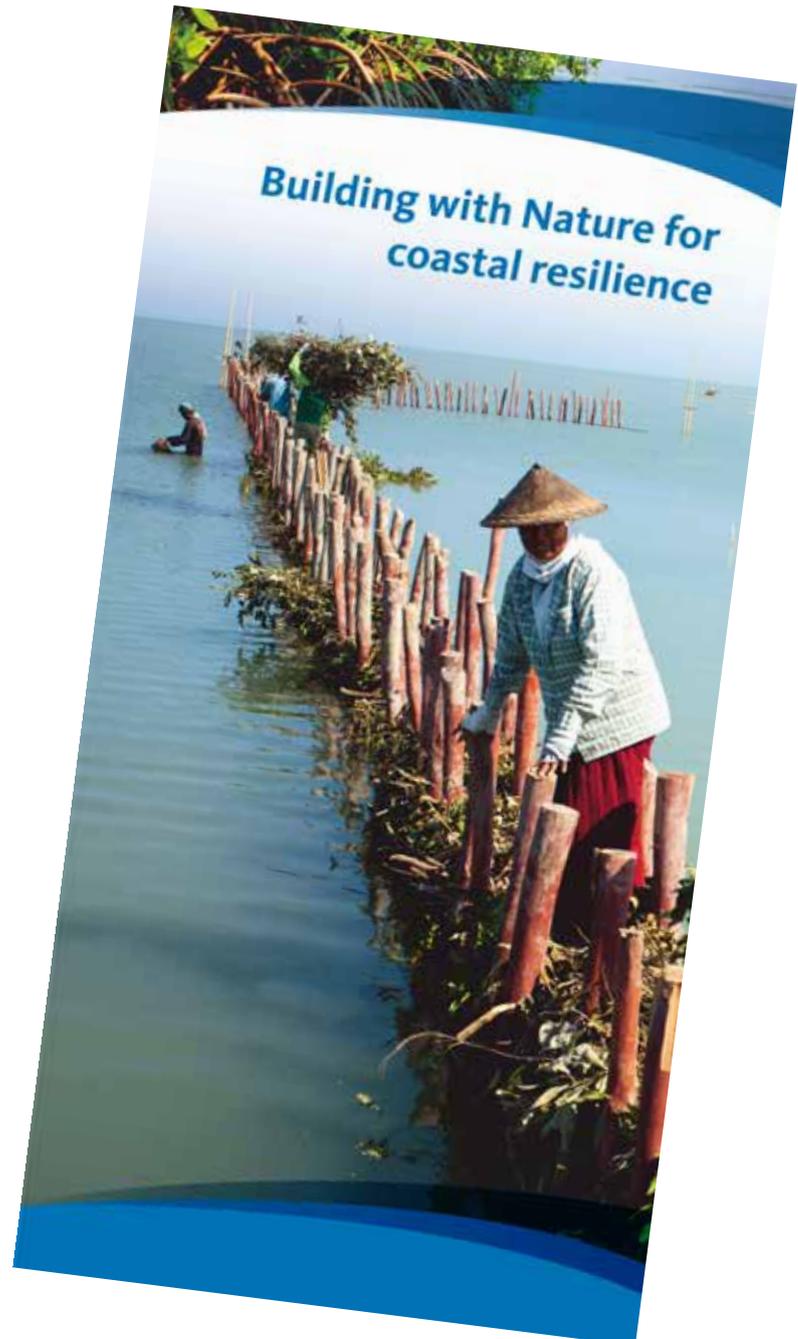
Sebagaimana secara kuat disampaikan dalam kajian, kehilangan keanekaragaman hayati, termasuk kehilangan lahan basah, bukan hanya menjadi masalah lingkungan tetapi juga masalah moral. Lebih jauh, kehilangan keanekaragaman hayati akan semakin menjauhkan kita dari pencapaian Sasaran Pembangunan Berkelanjutan. Inilah mengapa Wetlands International mengajak semua pihak untuk mengarusutamakan lahan basah dan keanekaragaman hayatinya untuk ditempatkan lebih integral dalam mendesain dan melaksanakan skema pembangunan.

Kami turut menggemakan ajakan para penulis laporan dalam mengajak masyarakat untuk mengembangkan hubungan baru dengan alam – kita menerima peran kita sebagai bagian dari alam, dan kita bekerja bersama alam. Kami mengajak untuk membuat suatu agenda transformatif yang memasukan pengakuan lahan basah sebagai modal alam dan mengikutsertakan pendekatan “membangun bersama alam” untuk menangani berbagai tantangan yang terkait dengan pembangunan dan iklim. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita membutuhkan tata kelola yang memadukan sektor kebijakan, teknologi, pembiayaan dan mendorong adanya perubahan perilaku.

Filosofi dan sains dari solusi berbasis alam membentuk inti dari kerja kami, di mana alam dan manusia menjadi saling terikat dan saling berhubungan erat. Kita melihat dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh baik dari solusi berbasis alam, yang kemudian dapat ditiru dan ditingkatkan, yang dapat memperlihatkan jalan untuk mentransformasikan bentang

alam dan memberikan sumbangan kepada dunia yang lebih aman. Kami mengundang setiap orang untuk bergabung dengan pekerjaan kami untuk melindungi lahan basah untuk masyarakat dan alam. ••

** Head of Programme Yayasan Lahan Basah (Wetlands International)*



Melindungi Burung Laut di Pesisir Yogyakarta

Radhitiya Anjar Pramana Putra dan Fransisca Noni Tirtaningtyas***

Sisi selatan Daerah Istimewa Yogyakarta menarik untuk diamati keanekaragaman jenis burungnya. Garis pantai sepanjang 110 km yang berbatasan dengan Samudera Hindia memiliki topografi landai dan berpasir hitam pada sisi barat, sedangkan pada sisi timur, tebing tinggi mencuat hingga 70 meter dan berpasir putih menjadi daya tarik tersendiri (Taufiqurrahman dkk., 2015).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY pada tahun 2016, batas wilayah laut di DIY sejauh 12 mil dari garis pantai menjadi salah satu lokasi mencari makan bagi burung laut. Potensi ikan dan habitat yang cocok,

menyebabkan burung laut banyak mencari makan dan menghabiskan waktu istirahat di lokasi tersebut.

Catatan oleh Taufiqurrahman dkk. (2015), mengungkapkan bahwa tebing-tebing yang berada di sisi timur, ternyata juga digunakan oleh buntut-sate putih untuk bersarang, sedangkan dara-laut tengkuk hitam menggunakan tebing tersebut untuk beristirahat sejenak setelah mencari ikan. Hasil catatan juga menjelaskan bahwa puluhan burung dari suku Fregatidae banyak melintas di sepanjang garis pantai DIY.

Potensi ikan dan sumber daya laut pesisir Yogyakarta, tidak hanya menjadi sumber makanan dan habitat bagi burung laut,

tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar pesisir. Rata-rata mata pencaharian masyarakat di 33 desa yang dekat dengan pantai adalah nelayan, budidaya ikan, penambang pasir, dan transportasi laut (BPS DIY, 2018).

Keberadaan burung laut telah lama menguntungkan nelayan saat di laut. Secara ekologis burung laut tergantung pada laut lepas dalam mencari makan (Howes dkk., 2003), sehingga nelayan pun sudah sejak lama menjadikan burung laut sebagai salah satu pertanda bahwa di suatu lokasi terdapat kumpulan ikan (Mallawa, 2010).

Namun, saat burung laut mencari makan bersamaan dengan nelayan,



ancaman terhadap burung laut dapat terjadi. Penelitian banyak mencatat bahwa tertangkap tidak sengaja pada kail atau jala nelayan menjadi salah satu yang menyebabkan kematian burung laut. Padahal, dari 346 jenis burung laut yang ada di dunia, 97 jenis (28%) berstatus terancam (*threatened*), 17 jenis (5%) dalam status kritis (*critically endangered*), dan lebih dari 10% hampir terancam (*near threatened*) (Croxall dkk., 2012).

Di Yogyakarta, tercatat 13 jenis burung laut yang dilindungi oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 yaitu Cikalang christmas (*Fregata andrewsi*), Cikalang besar (*Fregata ariel*), Angsabatu kakimerah (*Sula sula*), Angsabatu coklat (*Sula leucogaster*), Camarangguk coklat (*Anous stolidus*), Dara-laut kumis (*Chlidonias hybrida*), Dara-laut sayap-putih (*Chlidonias leucopterus*), Dara-laut tiram (*Gelochelidon nilotica*), Dara-laut batu (*Onychoprion anaethetus*), Dara-laut kecil (*Sterluna albifrons*), Dara-laut tengguk-hitam (*Sterna sumatrana*), Dara-laut biasa (*Sterna hirundo*), Dara-laut benggala (*Thalasseus bengalensis*), dan Dara-laut jambul (*Thalasseus bergii*) (Taufiqurrahman, dkk., 2015).

Cikalang christmas masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) dengan status kritis (*Critically Endangered/CR*) karena tren populasi yang menurun, saat ini jumlah individu di alam 2400-4800 ekor. Burung yang berbiak hanya di Pulau Christmas, Australia menjelajah hingga Indonesia saat mencari makan dan istirahat.

Pengetahuan yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat nelayan mengenai jenis burung

laut yang dilindungi menjadi tantangan bagi peneliti burung dalam menyebarkan informasi mengenai perlindungan burung laut kedepannya.

Burung laut dan masyarakat pesisir Yogyakarta

Untuk mengetahui informasi lebih banyak mengenai burung laut, khususnya jenis Cikalang christmas (*Fregata andrewsi*), maka diadakan pengamatan burung laut dan informasi terkait pada beberapa tempat, yaitu Pantai Trisik dan Pantai Baru yang mewakili sisi barat pesisir D.I. Yogyakarta, sedangkan untuk sisi timur diwakili oleh Pantai Sadeng dan Pantai Pok Tunggal. Informasi diperoleh dari beberapa nelayan, masyarakat, dan pegawai pemerintah.

Kegiatan yang menggunakan metode wawancara kepada masyarakat sekitar pesisir pantai dilakukan pada 30 dan 31 Maret 2019. Wawancara dilakukan terhadap 34 orang yang terdiri dari 14 orang nelayan, 14 orang masyarakat, dan 6 orang pemerintah lokal.

Wawancara dengan 12 dari 14 orang nelayan menyatakan bahwa belum pernah ada burung laut yang menyangkut pada jaring, jala, pancing, rumpun atau sawai yang digunakan nelayan saat mencari ikan di laut, sedangkan dua lainnya tidak menjawab. Diantara nelayan yang diwawancara, 12 orang diantaranya mengetahui jenis cikalang.

Wawancara dengan tujuh masyarakat diluar nelayan dari 14 orang yang memiliki mata pencaharian seperti pembuat bata merah, petani, penguras kapal, dan pengisi kapal mengatakan bahwa mereka mengetahui jenis cikalang,

empat orang tidak mengetahui jenis ini dan dua orang tidak menjawab.

Wawancara dengan tiga dari enam staf pemerintah lokal mengatakan bahwa mereka telah tahu mengenai perburuan burung dan tiga yang lain belum pernah. Ketiga orang mengatakan bahwa jenis burung yang sering diburu tidak ada pada jenis burung laut, namun jenis burung pantai dan burung berkicau, seperti Cucak kutilang, Anis merah, dan Jalak sering dilakukan. Menurut mereka tidak ada yang dilakukan oleh mereka atau cuek pada saat perburuan berlangsung, hal ini karena tidak ada himbuan dari pemerintah mengenai pelestarian burung.

Beberapa dari masyarakat yang dipergoki oleh pemerintah setempat mengatakan tujuan mereka berburu burung sebagai kebutuhan ekonomi, burung hasil tangkapan tersebut nantinya akan dijual kembali dan hanya sebagai hobi semata.

Pengetahuan masyarakat mengenai adanya burung laut, khususnya jenis cikalang cukup baik, dikarenakan menurut penuturan beberapa narasumber, burung laut menjadi pertanda angin buruk dan adanya kumpulan ikan di laut.

Meskipun informasi jenis burung laut yang ada di masyarakat sudah cukup baik, namun burung laut tidak lepas dari beberapa ancaman. Ancaman yang sangat terlihat berasal dari pencemaran air, baik limbah domestik maupun limbah industri. Beberapa orang dari masyarakat menyatakan bahwa mereka masih membuang sampah di sungai.

.....bersambung ke hal 22

Persoalan Kelembagaan yang Menangani Subsiden Tanah di Indonesia menjadi Isu Sentral

Jakarta, 17 Juni 2019. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan anggota kelompok kerja penyusun peta jalan amblesan (subsiden) tanah pada bulan Desember lalu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama dengan Yayasan lahan Basah (Wetlands International Indonesia) kembali melakukan rapat koordinasi pokja dengan agenda sosialisasi SK pokja dan draft *roadmap* yang selama ini telah disusun oleh tim perumus. Rapat yang dipimpin oleh Sahat M Panggabean, Asdep Kebencanaan Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini dihadiri oleh 24 orang perwakilan anggota pokja. Turut hadir dalam acara ini Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber daya Air Bappenas, Dr. Nur Hygiawati Rahayu.

Pokja penyusun peta jalan subsiden tanah disahkan melalui SK no. 5/DII/Maritim II/2019 pada

Februari 2019 lalu. Pokja yang diketuai oleh Asdep Kebencanaan Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini beranggotakan 48 perwakilan dari 11 kementerian dan lembaga, asosiasi dunia usaha, universitas dan lembaga penelitian serta LSM. Adapun tugas dari pokja ini adalah menyusun peta jalan dan rencana aksi mitigasi dan adaptasi subsiden tanah di dataran rendah pesisir, mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam membentuk Tim Kerja, dan mendorong penerapan program dan kegiatan sesuai dengan peta jalan dan rencana aksi mitigasi dan adaptasi amblesan tanah di dataran rendah pesisir. Pokja juga bertugas untuk mensinergikan pelaksanaan program mitigasi dan adaptasi amblesan tanah antar sektor, pusat dengan daerah, dan dengan *stakeholder* lainnya, memfasilitasi peluang pendanaan dan mendorong adanya percontohan

mitigasi dan adaptasi amblesan tanah di daerah.

Sebelum sosialisasi ini dilakukan, tim perumus yang terdiri dari Kemenko Maritim, Yayasan Lahan Basah, Ikatan Ahli Geodesi ITB, Direktur Konservasi Air PUPR dan Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan ESDM telah melakukan 2 kali rapat penyusunan draft *roadmap* dan melakukan *fieldtrip* ke Semarang, Demak dan Pekalongan. Temuan-temuan di lapangan digunakan untuk memperkaya isi *roadmap*.

Dalam diskusi draft *roadmap*, tim perumus yang diwakili oleh Dr. Heri Andreas menyampaikan setidaknya ada 6 strategi besar yang perlu dijalankan dalam kurun waktu 10 tahun mendatang dari 2019-2020, hal tersebut meliputi persoalan kelembagaan, penyusunan peta risiko subsiden, monitoring laju subsiden, penyusunan tata ruang



Peserta rapat koordinasi kelompok kerja penanganan permasalahan subsiden di Indonesia (Foto: dok. Pokja)

berbasiskan bencana subsidi, penyusunan strategi adaptasi dan penyusunan strategi mitigasi atau pencegahan dan penghentian laju subsidi. Adapun lokasi subsidi yang menjadi prioritas adalah kawasan pesisir, gambut, dan migas.

Dalam diskusi mengemuka bahwa persoalan kelembagaan yang menjadi krusial dan merupakan titik pangkal yang perlu disepakati bersama. Hingga saat ini persoalan yang terkait dengan penanganan

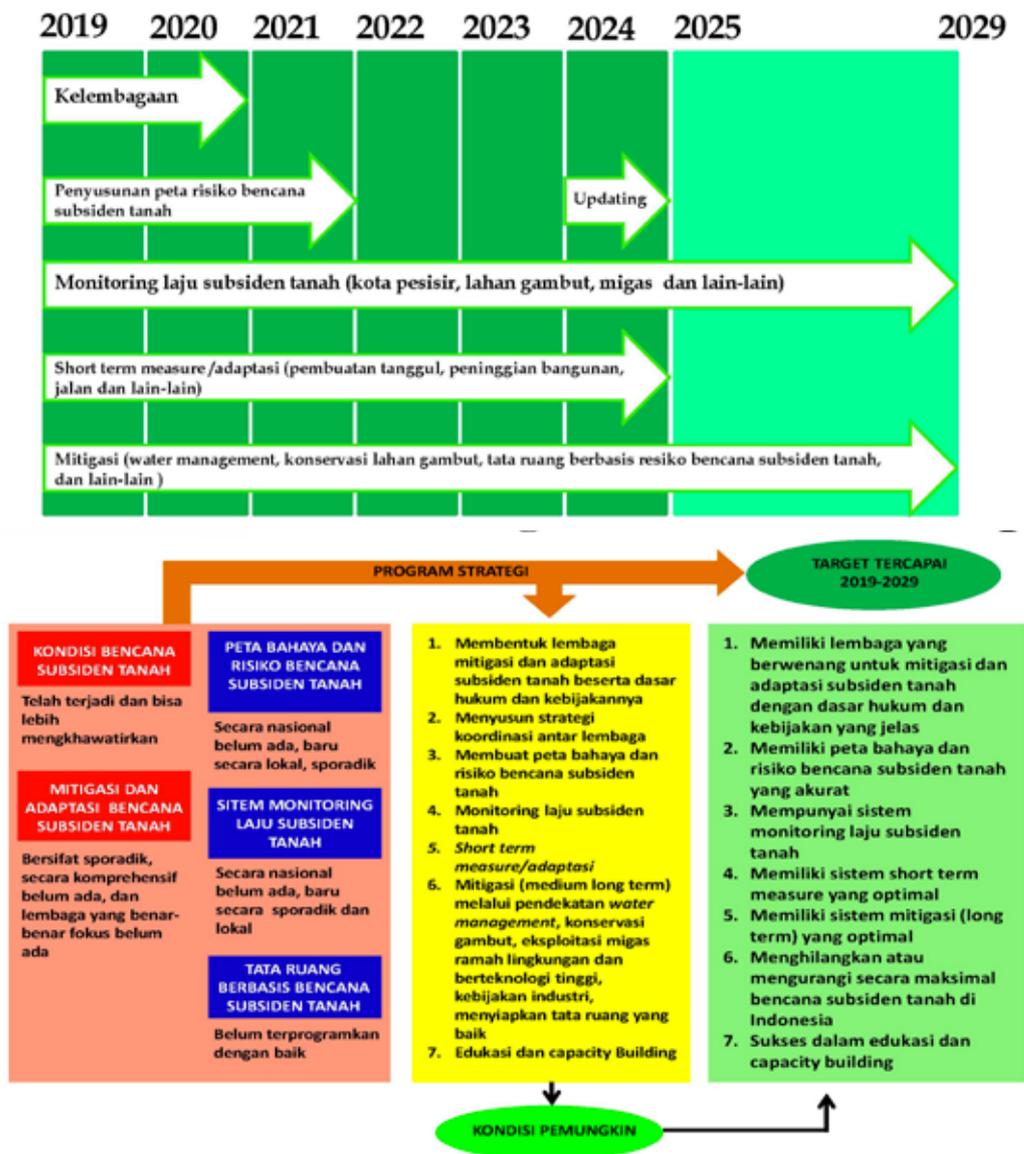
isu subsidi tanah tersebar di beberapa kementerian secara parsial, seperti persoalan konservasi air ada di Kementerian Lingkungan Hidup, monitoring penggunaan air tanah ada di Kementerian ESDM. Beberapa hal krusial lainnya malah belum ada yang melakukan sama sekali, seperti persoalan monitoring secara berkala. Selain itu, persoalan *mainstreaming* isu kedalam RPJMN juga menjadi hal yang perlu segera dilakukan mengingat saat ini pemerintah pusat yang

dikoordinatori oleh Bappenas tengah melakukan penyusunan RPJMN 2019-2024.

Beberapa hal yang menjadi catatan dan menjadi bahan tindak lanjut ke depannya dari rakor ini di antaranya penyusunan alternatif kelembagaan yang menangani isu subsidi tanah, pembuatan peta risiko bencana subsidi tanah, dan *mainstreaming* isu subsidi kedalam RPJMN. ••

(Dilaporkan oleh Susan Lusiana, Project Coordinator Pfr Indonesia)

Kerangka Umum Roadmap



..... sambungan dari halaman 3

Lebo Taliwang, Penyangga Kehidupan yang Perlu Pemulihan

Sumber Kakayaan Hayati

Sebagai kawasan lahan basah alami terbesar di Nusa Tenggara Barat, Lebo Taliwang merupakan sumber kehidupan biota baik yang hidup di perairan maupun biota yang menggantungkan sebagian hidupnya pada lebo tersebut. Tidak kurang dari 50 jenis burung yang sebagian besar merupakan burung air, dapat ditemukan di lokasi ini, antara lain: Kuntul kerbau (*Bubulcus ibis*), Kuntul besar (*Egretta alba*), Kuntul perak (*Egretta intermedia*), Blekok sawah (*Ardeola speciosa*), Mandar batu (*Gallinula chloropus*), Katungkat/ burung sepatu jengger (*Irediparra gallinacea*), Mandar Besar (*Porphyrio porphyrio*), Cangak merah (*Ardea purpurea*) dan Bambang merah (*Ixobrychus cinnamomeus*). Burung-burung pemakan ikan yang berwarna cerah pun turut mencari makan di Lebo Taliwang seperti raja Udang erasia (*Alcedo atthis*) dan Raja udang biru (*Alcedo coerulescens*). Burung-burung pemakan biji dan serangga pun dapat dijumpai di lebo ini, antara lain Bondol kepala pucat (*Lonchura pallida*), Pipit zebra (*Taeniopygia guttata*) dan Kutilang (*Pycnonotus aurigaster*). Burung predator juga dapat dijumpai di sini, Elang bondol (*Haliastur indus*), elang Alap coklat (*Accipiter fasciatus*) dan Alap-alap sapi (*Falco moluccensis*).

Hidupan dalam air yang ditemukan di Lebo Taliwang pun beranekaragam. Beberapa jenis ikan yang hidup di sini antara lain Nila (*Tilapia nilotica*), Gabus (*Ophiocephalus striatus*), Mujair (*Tilapia mozambica*), Sidat (*Anguilla sp*), Sepat (*Trichogaster pectoralis*). Selain merupakan habitat ikan, Lebo Taliwang juga menjadi rumah bagi beberapa jenis amfibi dan reptilia. Menurut konservasi4lebotaliwang.blogspot.com beberapa jenis amfibi tersebut adalah Katak kolong (*Bufo melanostictus*), Katak sawah (*Rana cancrivora*), Katak rawa (*Rana limnocharis*), Katak sungai (*Bufo asper*), Katak kolam (*Rana chalconota*), Katak gading (*Rana erythraea*), Katak hijau (*Occidozyga lima*), Katak tegalan (*Fejervarya limnocharis*), Katak batu (*Limnonectes macrodon*) dan Katak pohon (*Polypedates leucomystax*). Beberapa jenis reptilia juga dapat dijumpai di kawasan lahan basah ini, antara lain Kura-kura air tawar (*Coura amboinensis*) dan Biawak (*Varanus salvator*).

Kawasan Lebo Taliwang merupakan daerah penting bagi burung di Nusa Tenggara sesuai dengan ketetapan Kementerian Kehutanan bersama dengan Birdlife International pada tahun 2002. Menurut Birdlife International, hal ini mengingat bahwa Lebo Taliwang lebih kurang

79% dari 53 jenis burung air yang ditemukan di Sumbawa terdapat dalam kawasan ini, atau lebih kurang 46% dari seluruh burung air di Nusa Tenggara. Pada tahun 2002, kawasan Lebo Taliwang masih tercatat sebagai habitat burung air yang terancam punah, yaitu Bangau bluwok (*Mycteria cinerea*). Sayangnya jenis tersebut dalam beberapa tahun terakhir tidak teramati lagi.

Manfaat Untuk Masyarakat

Selain merupakan sumber kehidupan bagi kekayaan hayati di Pulau Sumbawa, Lebo Taliwang juga merupakan bagian dari denyut nadi kehidupan bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Ikan-ikan yang hidup di dalam lebo merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar. Ikan-ikan tersebut ditangkap untuk dikonsumsi dan dijual. Jenis yang banyak dimanfaatkan adalah Nila, Gabus, Mujair, Betok dan Sepat. Lebo taliwang juga menjadi sumber pengairan bagi sawah-sawah di sekitar lebo.

Seperti danau-danau lainnya, Lebo Taliwang mempunyai fungsi hidrologis sebagai penyimpan air yang berasal dari air hujan, aliran permukaan serta sungai-sungai yang bermuara di Lebo Taliwang. Di



Kuntul kerbau berteman dengan kuda di tepian Lebo Taliwang.



Mandar besar di Lebo Taliwang



Burung sepatu jengger di Lebo Taliwang

(Foto-foto: Tri Endang W.)



Aktivitas masyarakat memancing di danau Lebo Taliwang (Foto: Tri Endang W.)

kala musim hujan, danau ini akan menyimpan kelebihan air hujan dan menyimpannya sehingga menjadi persediaan air di kala kemarau.

Selain manfaat di atas, Lebo Taliwang juga menjadi lokasi wisata alam bagi masyarakat. Saat ini telah banyak aktivitas wisata dilakukan oleh masyarakat di danau ini. Sekedar menikmati pemandangan, memancing, berfoto, menelusuri danau menggunakan perahu dapat menjadi alternatif wisata untuk menyegarkan pikiran kembali.

Ancaman Bagi Lebo Taliwang

Secara kasat mata, sekitar 80% Lebo Taliwang telah tertutup oleh tanaman air, baik Enceng gondok maupun kiambang serta teratai. Pertumbuhan gulma-gulma air ini sangat cepat bahkan jika dibiarkan dapat menutupi permukaan air Lebo Taliwang. Hal seperti ini merupakan akibat dari eutrofikasi, atau pengayaan nutrisi yang sebenarnya telah menjadi masalah bagi sebagian besar danau di muka bumi. Eutrofikasi disebabkan oleh melimpahnya limbah fosfat dan nitrat. Fosfat dan nitrat yang ditemui di pupuk pertanian, pakan ternak maupun limbah rumah tangga, terutama detergen, dapat memasuki Lebo Taliwang melalui sungai maupun aliran air permukaan ke dalam danau. Melimpahnya fosfat dan nitrat di perairan menyebabkan pertumbuhan gulma air dan alga

yang cepat, menyebabkan warna air menjadi kehijauan. Penguraian limbah di dalam air yang memerlukan oksigen menyebabkan perairan menjadi kekurangan oksigen sehingga mengganggu pertumbuhan ikan dan makhluk hidup lain di dalam danau.

Pendangkalan juga menjadi masalah utama pada Lebo Taliwang. Berdasarkan pemantauan BKSDA NTB pada tahun 2002, kedalaman danau ini masih mencapai 6 – 7 meter. Namun tahun 2018 atau dalam kurun waktu 16 tahun, kedalaman danau hanya mencapai maksimal sekitar 2 meter. Pendangkalan disebabkan karena air yang masuk ke danau baik dari sungai maupun aliran permukaan membawa material lumpur. Pengendapan lumpur dipercepat dengan adanya proses penguraian unsur-unsur organik di perairan. Dengan melihat kasus tersebut, maka jika dibiarkan dalam beberapa tahun lagi Lebo Taliwang akan menjadi daratan.

Penambangan emas ilegal di sebagian perbukitan di sekitar Lebo Taliwang juga menjadi ancaman serius bagi kelestarian lebo. Sisa-sisa merkuri yang digunakan dalam pengolahan bebatuan untuk memperoleh emas dapat terbawa air permukaan masuk ke dalam lebo. Merkuri merupakan salah satu logam berat yang dapat terakumulasi di tubuh biota dan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia.

Upaya Optimalisasi Danau

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nusa Tenggara Barat sebagai pengelola Taman Wisata Alam (TWA) Danau Taliwang telah berupaya melakukan optimalisasi fungsi Lebo Taliwang dengan melakukan pembersihan gulma. Namun upaya tersebut tidak sebanding dengan kecepatan pertumbuhan gulma-gulma air. Areal bekas pembersihan akan kembali tertutup gulma dengan cepat.

Sejak tahun 2016, BKSDA Nusa Tenggara Barat telah menyusun Rencana Pemulihan Ekosistem TWA Danau Rawa Taliwang. Dalam kegiatan tersebut, BKSDA NTB menggandeng Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Balai Wilayah Sungai Bali Nusa Tenggara I. Sampai dengan tahun 2018 ini telah dicapai kemajuan kegiatan terkait kerjasama tersebut, berupa pembersihan gulma dan pembangunan jalan yang menjadi inisiasi sabuk hijau di sekitar lebo. Untuk menunjang wisata alam BKSDA NTB juga telah membangun dermaga dari kayu untuk aktivitas wisata maupun berfoto.

Dalam memberdayakan masyarakat sekitar lebo, BKSDA NTB telah memberikan bantuan berupa sampan untuk masyarakat di Desa Meraran Kecamatan. Sampan kemudian disewakan kepada pengunjung yang ingin berkeliling wisata di Lebo Taliwang. Dari hasil dari penyewaan ini, masyarakat telah mampu membeli sampan lagi. ••

* Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) pada BKSDA Nusa Tenggara Barat

Sepenggal Cerita *Program Building with Nature* Indonesia dari Desa Betahwalang

Abu Dawud, Kuswantoro** dan Apri Susanto Astra****

Kisah ini bermula pada awal kuartal kedua tahun 2016, saat pertama kalinya tim Wetlands International Indonesia yang terdiri dari Eko Budi Priyanto, Kuswantoro dan Didik Fitrianto, memperkenalkan program *Building with Nature* (BwN) kepada pemerintah dan warga Desa Betahwalang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

Pertemuan demi pertemuan secara rutin dilaksanakan oleh tim BwN bersama warga desa, dengan agenda awal berupa penggalian informasi tentang permasalahan, potensi, kebijakan, opsi solusi serta visi dan misi desa. Secara simultan, program BwN juga mulai melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang Tambak, yaitu sebuah kegiatan pembelajaran

bersama teknik budidaya perikanan yang ramah lingkungan. Memasuki pertengahan tahun 2016, terbentuklah kelompok masyarakat di Desa Betahwalang dengan nama Kelompok Sido Makmur yang beranggotakan 30 orang warga desa.

Abu Dawud, salah satu pengurus kelompok Sido Makmur, Desa Betahwalang, mencoba menuturkan pengalaman dan penilaiannya mengenai perbedaan kondisi lingkungan pesisir desanya sebelum dan sesudah kegiatan *Building with Nature* diterapkan.

Abu Dawud awalnya merasa tidak yakin dengan program BwN di desanya, anggapannya hanya kegiatan biasa-biasa saja. Namun, saat

mengikuti pertemuan demi pertemuan, Abu Dawud mendapat banyak manfaat dan penilaian adanya peluang besar bagi perkembangan masyarakat dan wilayah pesisirnya. Dukungan program BwN dengan mendirikan Sekolah Lapang Tambak, menambah keyakinan dan semangat Abu Dawud serta anggota kelompok lainnya untuk mengembangkan kemampuan dasar dalam berkomunikasi, berpikir, dan bermasyarakat, serta cara budidaya dalam tambak yang baik dan ramah lingkungan.

Tahapan berikutnya, program BwN memperkenalkan mekanisme *Bio-rights* semacam mekanisme kerjasama timbal balik yang saling mengikat. Program akan memberikan dukungan bantuan modal usaha kepada



Abu Dawud (kedua dari kanan) bersama anggota Kelompok Sido Makmur sedang melakukan monitoring di lokasi kegiatan rehabilitasi jalur hijau Desa Betahwalang. (Foto: Kuswantoro)



Penebaran bibit ikan bandeng di tambak budidaya (Foto: Kuswantoro)



Lokasi rehabilitasi jalur hijau Desa Betahwalang, November 2017 (Foto: Kuswantoro)



Lokasi rehabilitasi jalur hijau Desa Betahwalang, September 2018 (Foto: Kuswantoro)

anggota kelompok, dan sebagai kompensasinya kelompok wajib melaksanakan program-program BwN, antara lain ymerehabilitasi dan merestorasi kawasan pesisir mereka. Perjanjian kerjasama yang saling mengikat ini disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dana tahap pertamapun mulai dicairkan. Abu Dawud semakin bertambah keyakinannya, program yang ditawarkan BwN ternyata bukanlah hanya angan-angan dan pemberi harapan belaka. "Kami sangat senang, dana tersebut akan kami manfaatkan sebaik-baiknya bagi pengembangan usaha budidaya tambak kami" ujar Abu Dawud. "Sebagai kompensasinya, kami siap untuk berkomitmen menjalankan program-program BwN di desa kami", sambungnya penuh semangat.

Kelompok mulai menyusun rencana kerja dan melaksanakan program-program BwN, seperti: rehabilitasi jalur hijau pantai, revitalisasi tambak budidaya, usaha ekonomi kelompok, mengadakan pertemuan rutin kelompok, terlibat dalam Musrenbang tingkat desa, penyusunan peraturan desa terkait pengelolaan pesisir, dan monitoring.

Seiring perjalanan waktu, kerja sama tersebut telah terlihat hasilnya. Panen tambak meningkat walaupun masih belum banyak, namun cukup untuk mendukung perekonomian

keluarga para anggota kelompok. Selain itu produksi tepung dari cangkang rajungan turut memberikan tambahan pendapatan bagi kelompok.

Di penghujung tahun 2017, kelompok Sido Makmur memasang waring dan bambu (struktur permeabel) di pantai depan tambak-tambak mereka yang terkena abrasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari program BwN khususnya di Desa Betahwalang untuk mengembalikan hutan mangrove yang hilang dengan cara memerangkap sedimen agar terbentuk media tumbuh bagi bibit mangrove yang jatuh di atasnya.

Dalam kurun waktu 4 bulan, sedimentasi berupa lumpur dan bibit-bibit mangrove yang tumbuh secara alami mulai tampak secara signifikan. Untuk memantau tingkat laju sedimentasi, kelompok telah memasang pipa monitoring, dan papan peringatan agar siapapun tidak mengganggu lokasi pemulihan tersebut.

Hasil monitoring di kuartal akhir tahun 2018, terpantau sedimentasi semakin bertambah luas, pengamatan pipa monitoring menunjukkan laju sedimentasinya mencapai 15 cm per bulan. Begitu pula dengan perkembangan tumbuhan mangrove alami di atasnya terpantau tumbuh subur, diantaranya jenis *Avicennia marina* dan *Avicennia alba*.

Selain semua capaian tersebut, peningkatan kapasitas juga dialami oleh kelompok Sido Makmur di Desa Betahwalang dalam penyusunan proposal, salah satu tolok ukur keberhasilannya adalah dengan disetujuinya proposal oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak pada periode tahun 2018-2019. Dukungan berupa penyediaan bibit udang vaname sebanyak 352.000 ekor, pemberian Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) untuk 16 anggota Kelompok Sido Makmur, penyediaan bibit ikan bandeng sebanyak 70.000 ekor, dan pelibatan anggota Kelompok Sido Makmur dalam pelatihan dan studi banding budidaya ikan bandeng di Kabupaten Kendal.

Abu Dawud mewakili seluruh anggota kelompok mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung program BwN di Desa Betahwalang, khususnya kepada Wetlands International Indonesia dan Blue Forests. "Semoga program BwN dapat terus dikembangkan secara berkesinambungan di desa kami", ungkap Abu Dawud penuh harap. ••

** Sekretaris Kelompok Sido Makmur, Desa Betahwalang*

*** Community Development Officer Yayasan Lahan Basah (Wetlands International)*

**** Project Coordinator BwN Indonesia*

Sayangi dan Lindungi Terumbu Karang Kita

*Fikri Fadhillah**

Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang merupakan sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga.

Terumbu karang menjadi tempat tinggal dan berkembang biak yang sangat nyaman bagi hewan-hewan laut kecil seperti ikan, kepiting, udang, kerang dsb. sekaligus tempat berlindung mereka dari ancaman hewan predator lain.

Selain berperan untuk menjaga ekosistem laut, terumbu karang juga dapat menjadi obyek wisata bawah laut yang menarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Dengan demikian, ekosistem terumbu karang dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Terumbu karang membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk tumbuh dan berkembang biak secara alami. Karena itulah penting sekali bagi kita untuk melestarikan terumbu karang di pesisir kita. Terumbu karang yang masih sehat dan baik dapat dijadikan salah satu indikator bahwa lingkungan pesisir di wilayah tersebut belum tercemar oleh limbah-limbah yang akan merusak lingkungan.

Namun, kenyataan saat ini, keberadaan sebagian terumbu karang di Indonesia telah mengalami kerusakan dan kehancuran akibat ulah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Keanekaragaman hayati terutama ikan-ikan yang biasa bersenda gurau di dalamnya turut pula hilang entah ke mana. Ekosistem pesisir yang sebelumnya tangguh kini

menjadi lemah dan rentan, akhirnya kehidupan masyarakat di sekitarnya menjadi ikut terancam.

Diperlukan upaya-upaya nyata untuk mengembalikan dan melestarikan ekosistem terumbu karang, seperti tidak membuang sampah dan limbah ke laut, tidak menggunakan racun atau bom untuk menangkap ikan, tidak mengambil terumbu karang untuk keperluan apapun, dan lain sebagainya. Jika terumbu karang kembali sehat dan berseri, maka peran dan fungsinya pun akan kembali pula, sehingga ancaman abrasi dan pencemaran pantai akan kembali dapat dicegah secara alami.

Semoga terumbu karang dan laut Indonesia menjadi lebih indah dan lestari.

**SMKN 2 Kota Serang*

Lindungilah terumbu karang kita (Ilustrasi: Aldo Suryadiputra)



Telah dipublikasikan flyer Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Kerentanan Pesisir di Kota Serang, Provinsi Banten. Data yang disajikan berasal dari hasil kajian risiko bencana, kajian sempadan pantai, dan kajian strategi pengelolaan ekosistem mangrove di pesisir Kota Serang, yang

dilakukan oleh Wetlands International Indonesia melalui program *Partners for Resilience Strategic Partnership* (PFRSP).

Untuk mengetahui secara lengkap mengenai potret dinamika garis pantai pesisir; Analisa Indeks Kerentanan, Ancaman, dan Risiko Erosi

Pantai; Analisa Perkiraan/Estimasi Nilai Manfaat Ekonomi Ekosistem Mangrove; serta Strategi Pengelolaan Mangrove Berbasis Kerentanan di pesisir Kota Serang, Banten, silahkan hubungi kami atau klik gambar di bawah ini.



Kekayaan Burung di Habitat Lahan Basah Tersisa di Jakarta Utara

Fransisca Noni Tirtaningtyas*, Nani Rahayu**, Dede Dicky Permadi**, Fega Purnama**, Prayitno Goenarto*

Taman Wisata Alam Angke Kapuk (TWAAK) menjadi salah satu lahan basah yang tersisa di Jakarta yang terletak di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara. Kawasan ini berbatasan dengan Arboretum Angke Kapuk di sebelah barat, Perumahan Pantai Indah Kapuk di sebelah selatan, Hutan Lindung Angke Kapuk dan Teluk Jakarta di sebelah timur dan utara (BKSDA Jakarta 2015).

Sumber mata pencaharian masyarakat di sekitar TWAAK adalah nelayan (48,92%), buruh (26,02%) dan karyawan swasta atau negeri (11,61%). Kondisi hidrologi kawasan dipengaruhi oleh keadaan tambak, sungai, dan pasang surut dengan keadaan air yang berkadar garam 20 – 40%. Beberapa sungai kecil di dalam kawasan hanya merupakan kanal dan saluran air yang menghubungkan tambak-tambak.

TWAAK berbatasan langsung dengan Teluk Jakarta sehingga kawasan ini menjadi “saringan” bagi sampah yang dibuang melalui 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta. Sekitar 21 ton sampah mengalir dari sungai-sungai di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi ke Teluk Jakarta. Pada saat pasang, sampah terbawa ke darat termasuk ke dalam TWAAK, dan saat surut



Mangrove di TWA Angke Kapuk (kiri) dan Jalur di dalam TWA Angke Kapuk (kanan) (Foto: Fransiska Noni T.)

sampah tersebut tertinggal di antara akar nafas mangrove.

Jenis mangrove yang mendominasi di kawasan ini antara lain, Api-api (*Avicennia marina*), Bakau kurap (*Rhizophora mucronata*) dan Bakau minyak (*Rhizophora apiculata*), sedangkan jenis flora pantai/ rawa adalah Waru laut (*Thespesia populnea*), Bluntas (*Pluchea indica*), Mendongan (*Scripus littoralis*), Kitower (*Derris heterophylla*) dan Mengkudu (*Morinda citrifolia*).

Meskipun berada di antara lokasi yang rawan terhadap polusi sampah, lokasi ini ternyata masih menyimpan banyak kekayaan avifauna. Jenis tumbuhan mangrove menjadi salah satu lokasi berbiak, istirahat, dan mencari makan bagi jenis burung air dan jenis burung hutan di antara gedung dan perumahan di sekitar TWAAK.

Jenis Burung di Kawasan TWA Angke Kapuk

Pengumpulan data mengenai avifauna penting untuk dilakukan karena kelompok satwa tersebut menjadi salah satu indikator pentingnya suatu habitat sehingga perlu terus dipertahankan keberadaannya. Pengamatan burung di TWA Angke Kapuk dilakukan pada Januari 2018 dan April 2019 melalui observasi (*ground check*) dan *consentration count*. Pengamatan dilakukan dari pagi hari hingga sore hari (07.00-17.00 WIB) di sepanjang jalur dan lokasi berkumpulnya burung air di hutan mangrove TWA Angke Kapuk. Penjelajahan kawasan dilakukan dengan berjalan kaki dan menggunakan *speedboat*.

Berdasarkan dua kegiatan pemantauan, didapat 38 jenis

burung yang terdiri atas 12 jenis burung air dan 26 jenis burung hutan di kawasan ini (Tabel 1). Terpantau juga jenis burung migran yang menggunakan lokasi ini untuk istirahat dan mencari makan, yaitu jenis Trinil pantai (*Actitis hypoleucos*) dan Jalak cina (*Sturnus sturninus*). Dari seluruh jenis yang ditemukan, terdapat lima jenis burung yang dilindungi oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, yaitu Tangkar centrong, Cangak besar, Elang tiram, Pecuk ular, dan Kipasan belang.

TWA Angke Kapuk menjadi salah satu lokasi kumpulan burung untuk berbiak, mencari makan atau istirahat. Jumlah jenis burung yang masih terpantau lebih dari 10 individu setiap jenisnya bahkan hingga ratusan dapat dikatakan masih membutuhkan ruang untuk aktivitas istirahat. Luas kawasan yang hanya 99,82 ha mungkin masih kurang untuk menampung jumlah yang terpantau pada saat survei. Lokasi terdekat dari TWA Angke Kapuk yang diduga menjadi wilayah jelajah burung-burung di kawasan ini adalah Hutan Lindung Angke Kapuk, Suaka Margasatwa Muara Angke, beberapa pulau kecil di Teluk Jakarta, serta tambak-tambak yang dekat dengan laut.

Selain mencari makan dan istirahat, beberapa jenis burung juga melakukan aktivitas berkembang biak di TWA AK. Jenis burung yang teramati berkembang biak di kawasan ini adalah Kuntul kecil *Egretta garzetta*, Pecuk ular asia *Anhinga melanogaster*, Itik benjut *Anas gibberifrons*, dan Kareo padi *Amaurornis phoenicurus*. Burung-burung ini, kecuali itik benjut, pada umumnya membuat sarang pada pohon api-api.

Tabel 1. Jenis burung di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk

No.	Spesies		2018*	2019*	Perlindungan P.106/2018
	Lokal	Latin			
1	Trinil pantai	<i>Actitis hypoleucos</i>	20	2	-
2	Cipoh kacat	<i>Aegithina tiphia</i>	-	2	-
3	Raja-udang biru	<i>Alcedo coerulescens</i>	4	2	-
4	Kareo padi	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	9	2	-
5	Itik benjut	<i>Anas gibberifrons</i>	50	34	-
6	Pecuk-ular asia	<i>Anhinga melanogaster</i>	48	1	√
7	Kapinis rumah	<i>Apus nipalensis</i>	-	1	-
8	Cangak abu	<i>Ardea cinerea</i>	18	1	-
9	Cangak merah	<i>Ardea purpurea</i>	5	-	-
10	Blekok sawah	<i>Ardeola speciosa</i>	182	20	-
11	Kuntul kerbau	<i>Bubulcus ibis</i>	35	-	-
12	Kokokan laut	<i>Butorides striata</i>	49	1	-
13	Burung-madu sriganti	<i>Cinnyris jugularis</i>	1	1	-
14	Walet sapi	<i>Collocalia esculenta</i>	2	>10	-
15	Tangkar centrong	<i>Crypsirina temia</i>	-	1	√
16	Caladi tilik	<i>Dendrocopos moluccensis</i>	2	-	-
17	Cabai jawa	<i>Dicaeum trochileum</i>	-	1	-
18	Cangak besar	<i>Ardea alba</i>	40	-	√
19	Kuntul kecil	<i>Egretta garzetta</i>	71	2	-
20	Kuntul perak	<i>Egretta intermedia</i>	9	-	-
21	Perkutut jawa	<i>Geopelia striata</i>	4	2	-
22	Remetek laut	<i>Gerygone sulphurea</i>	10	3	-
23	Isap-madu indonesia	<i>Lichmera limbata</i>	-	3	-
24	Bondol peking	<i>Lonchura punctulata</i>	2	-	-
25	Bondol jawa	<i>Lonchura leucogastroides</i>	2	6	-
26	Kowak-malam abu	<i>Nycticorax nycticorax</i>	4	-	-
27	Cinenen kelabu	<i>Orthotomus ruficeps</i>	2	1	-
28	Elang tiram	<i>Pandion haliaetus</i>	2	-	√
29	Burung-gereja erasia	<i>Passer montanus</i>	-	10	-
30	Pecuk-padi hitam	<i>Phalacrocorax sulcirostris</i>	360	2	-
31	Perenjak jawa	<i>Prinia familiaris</i>	1	-	-
32	Cucak kutilang	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	3	2	-
33	Merbah cerukcuk	<i>Pycnonotus goiavier</i>	-	2	-
34	Kipasan belang	<i>Rhipidura javanica</i>	4	-	√
35	Tekukur biasa	<i>Streptopelia chinensis</i>	18	-	-
36	Jalak cina	<i>Sturnus sturninus</i>	100	-	-
37	Cekakak sungai	<i>Halcyon chloris</i>	8	2	-
38	Punai gading	<i>Treron vernans</i>	5	-	-

.....bersambung ke hal 23

..... sambungan dari halaman 5

Result Based Payment dalam REDD+ di Indonesia

Dalam banyak kasus, hasil yang dicapai oleh suatu proyek menjadi tidak terawat, rusak, dan tidak menentu keberlanjutannya. Dalam konteks ini maka pendanaan melalui RBP dapat menjadi salah satu solusi untuk menjamin keberlanjutan kegiatan. Bagi LSM, dana proyek yang tersedia dapat dijadikan semacam *start up* hingga program berjalan di lapangan, didaftarkan, dan dapat mengakses pendanaan RBP untuk keberlanjutannya.

Selain para pelaku konservasi dan restorasi, skema RBP juga akan membuka peluang bagi para konsultan untuk dapat mengambil bagian dalam verifikasi capaian pengurangan emisi yang dilaporkan oleh pelaku REDD+. Apabila terdapat seribu kegiatan yang terdaftar, maka akan banyak peluang paket-paket pekerjaan untuk konsultan tiap tahunnya. Tidak hanya itu, peluang munculnya jasa konsultasi untuk pembuatan *concept note*, pembuatan proposal, pengukuran, atau penghitungan pengurangan emisi juga akan terbuka luas.

Dalam dasawarsa terakhir, masyarakat semakin banyak

dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan SDA, terutama konservasi-restorasi hutan. Berbagai paket pemberdayaan ekonomi masyarakat telah menjadi bagian dalam program-program yang diimplementasikan oleh pemerintah, LSM, maupun pihak-pihak lain. Tidak sedikit di antara kelompok masyarakat telah merasakan hasil dalam bentuk peningkatan pendapatan dan taraf ekonomi. Meskipun demikian, harus diakui masih banyak program pemberdayaan yang belum berhasil atau gagal dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Terlepas dari hal ini, pelaksanaan REDD+ dengan skema RBP akan lebih membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif. Bahkan melalui Hutan Desa (HD) atau Hutan Kemasyarakatan (HKM), masyarakat dapat mendaftarkan kegiatannya ke dalam SRN PPI untuk dapat mengakses skema RBP. Apabila ini dilakukan, maka dukungan pihak-pihak lain akan sangat diperlukan mengingat kapasitas masyarakat yang ada saat ini dinilai masih belum memadai terutama untuk melakukan kegiatan *Monitoring, Reporting and Verification* (MRV).

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa telah terdapat peraturan yang secara khusus mengatur MRV dan inventarisasi GRK. Namun demikian, apakah peraturan tersebut benar-benar telah siap untuk digunakan pelaksana REDD+ dalam melakukan penghitungan pengurangan emisi atau penyerapan emisi? Apabila kita mengunjungi situs *Verified Carbon Standard* atau Verra, maka terdapat banyak sekali *tool, module*, atau *methodology* yang tersedia untuk dapat dijadikan basis dalam melakukan kuantifikasi pengurangan atau penyerapan karbon melalui tipe atau kategori proyek seperti REDD, IFM (*Improved Forest Management*), atau ARR (*Aforestation, Reforestation, and Revegetation*). Sebelum penghitungan emisi dilakukan, *eligibility* dan *additionality* dari suatu proyek harus dibuktikan terlebih dahulu melalui *tool* yang tersedia. Dengan menggunakan *tool* yang berbeda, penentuan skenario BAU (*Business As Usual*) ditentukan dengan mengikuti langkah-langkah yang ada. Baru kemudian penghitungan pengurangan emisi atau penyerapan emisi



Kegiatan rehabilitasi di lahan gambut (Foto: Iwan Tri Cahyo W.)

dilakukan dengan mencari selisih antara emisi dari skenario tanpa intervensi (BAU) dan dengan intervensi (*project*), dengan juga memperhitungkan *Leakage* dan *Buffer*. Mempelajari peraturan yang ada, Permen LHK No. 72 Tahun 2017 dan Permen LHK No. 73 Tahun 2017 dirasa masih perlu didetailkan kedalam petunjuk yang lebih teknis (turunan aturan lain) seperti yang telah dicontohkan sebelumnya dalam VCS (dalam bentuk *tool*, *module* dan *methodology*). Apabila petunjuk yang lebih teknis ini telah tersedia, maka pelaksana REDD+ tinggal memilih mana saja yang sesuai dengan BAU dan intervensi yang dilakukan.

Di sisi lain, untuk dapat mengoptimalkan pelaksana REDD+ dalam mengakses RBP, perbaikan *Forest Reference Emission Level* (FREL) perlu dilakukan agar manfaat karbon dari *Conservation*, *Sustainable Management of Forest*, dan *Enhancement of Forest Carbon Stocks* berpotensi dapat di klaim dalam RBP REDD+. Hal ini mengingat perhitungan FREL saat ini hanya mencakup emisi dari deforestasi, degradasi hutan, dan dekomposisi gambut. Sementara untuk forest growth (dari kegiatan konservasi), pengurangan emisi dari pengelolaan hutan lestari, dan karbon yang diserap melalui kegiatan penanaman masih belum masuk di dalamnya, sehingga belum bisa diklaim untuk REDD+.

Bagaimana pelaksanaan skema RBP dalam REDD+ saat ini? Menengok data pada website resmi SRN PPI hingga akhir Januari 2019, telah terdapat 928 pendaftar (*registar*) dengan melibatkan 2192 kegiatan. Dari jumlah ini, telah terdapat 289 nomor registri (*registry number*) yang dikeluarkan. Namun sayang, informasi lebih detail mengenai berapa yang masuk kategori

RBP dan mana yang non-RBP tidak dapat diperoleh. Terlepas dari hal tersebut, hal ini cukup untuk mengkonfirmasi bahwa rangkaian kegiatan REDD+ terus berjalan, setidaknya di tahap awal yaitu *registry*. Tidak menutup kemungkinan bahwa pendaftar akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu.

Pertanyaan yang lain adalah dari mana sumber pendanaannya? Di dalam pasal 16 Permen LHK 70 Tahun 2017, disebutkan bahwa sumber pendanaan dapat berasal dari hibah, kerjasama/pembayaran program, atau kegiatan yang berbasis kinerja, anggaran pendapatan, dan belanja negara, dan sumber lainnya yang sah. Hal penting untuk diketahui adalah realisasi pendanaan yang telah siap digunakan untuk menjalankan skema RBP.

Pada pertengahan bulan Februari 2019, media massa ramai-ramai memberitakan bahwa Norwegia siap melakukan pembayaran pertama untuk pengurangan emisi GRK sebesar 4,8 juta ton karbon dioksida (CO₂) kepada Indonesia untuk laporan 2016 sampai 2017. Dari informasi ini, spekulasi berkembang bahwa kesiapan pembayaran Norwegia ini terkait dengan RBP. Tentunya informasi ini perlu dikonfirmasi dan mendapat penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Selain informasi ini, menarik sekali untuk mengetahui apakah sumber-sumber dana lainnya, misalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah dieksplorasi atau dialokasikan untuk keperluan RBP. Sebagaimana direncanakan, dana dari berbagai sumber ini akan dimasukkan ke dalam satu kantor oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang merupakan entitas yang berperan sebagai mekanisme pendanaan bagi proyek terkait perubahan iklim dan isu lingkungan hidup, termasuk REDD+ di dalamnya.

Apabila hal-hal yang terkait dengan sumber pendanaan dan institusi pengelolanya telah ada kejelasan, maka akan muncul beberapa pertanyaan lain. Terkait dengan teknis pencairan dana, pertanyaan penting di antaranya adalah; berapa nilai pembayaran yang diberikan untuk setiap pengurangan emisi yang terverifikasi? Atau, apakah ada perbedaan nilai pembayaran antara pengurangan emisi dan penyerapan emisi? Informasi ini sangat ditunggu, mengingat hal ini akan menentukan apakah nilai pembayaran ini sebanding dengan upaya yang dilakukan di lapangan atau tidak.

Perkembangan dari proses yang sedang berjalan oleh pelaksana REDD+ yang telah mendaftar SNI PPI penting sekali untuk diketahui. Kisah sukses (*success story*) sangat diperlukan agar ketidakpastian, keraguan, dan pertanyaan-pertanyaan di atas dapat terjawab dengan tuntas. Apabila ada contoh kasus yang membuktikan bahwa RBP benar-benar terealisasi, dan memberikan keuntungan, maka ini akan dapat menjadi daya tarik bagi para pihak untuk ramai mengikuti kisah sukses ini. Apabila demikian, maka pengurangan emisi dari REDD+ diyakini akan berjalan secara progresif dan signifikan. Namun sebaliknya, apabila ternyata RBP pada akhirnya tidak terealisasi (tidak ada pembayaran), atau terjadi pembayaran namun tidak menguntungkan, maka akan sulit meyakinkan para pihak untuk ikut mendaftar dan berkontribusi melalui REDD+. ••

**Programme Coordinator Wetlands Conservation and Restoration, Yayasan Lahan Basah (Wetlands International)*

..... sambungan dari halaman 9

Melindungi Burung Laut di Pesisir Yogyakarta

D.I. Yogyakarta memiliki sembilan sungai yang melewati empat kabupaten dan satu kota dengan dua muara sungai, yaitu Muara Sungai Progo dan Muara Sungai Opak. Menurut data BPS DIY (2018), ada delapan lokasi pembuangan sampah yang dibuang langsung ke sungai. Selain itu lokasi D.I. Yogyakarta yang berbatasan dengan Samudera Hindia membuat semakin banyaknya sampah yang ada di laut. Bisa terjadi bahwa sampah yang berada di air tidak secara sengaja dimakan oleh burung laut, karena mengira sampah yang mengambang tersebut itu adalah ikan.

Sampah menjadi salah satu penyebab banyaknya burung laut yang mati. Menurut Wilcox dkk. (2015), sekitar 59% jenis burung laut dalam studi yang dilaporkan di literatur antara tahun 1962 dan 2012, sekitar 29% individu telah mencerna plastik dan ditemukan di ususnya. Selain itu kegiatan nelayan terkadang juga dapat menyebabkan kematian, kebanyakan adalah tertangkap tidak sengaja pada jaring atau alat pancing yang digunakan. Di Teluk Jakarta, jenis Cikalang christmas dan Dara-laut kecil terpantau terjerat alat pancing pada tahun 2011 hingga 2013 (Tirtaningtyas dan Yordan, 2017). Informasi mengenai burung laut yang dikonsumsi juga dialami oleh salah satu narasumber yang pada saat mudanya sering mengonsumsi jenis burung laut.



Konservasi burung laut

Informasi mengenai status perlindungan burung laut atau sosialisasi mengenai status perlindungan dan ancaman burung laut belum banyak diketahui, baik oleh masyarakat maupun pemerintah setempat. Dari seluruh staf pemerintahan lokal yang diwawancarai mengatakan bahwa informasi mengenai status perlindungan maupun ancaman pada burung laut masih sangat minim. Meskipun demikian, menurut salah satu sumber bahwa telah ada pendidikan lingkungan mengenai sampah, oleh Badan Lingkungan Hidup, pendidikan penangkapan lobster oleh Polisi Air dan Udara (Polairud), penyuluhan mengenai penyu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemerintah lokal terkait diharapkan untuk dapat memberikan sosialisasi mengenai status perlindungan dan ancaman pada burung laut, dimulai dari jenis dan status burung laut yang terdapat di Provinsi DIY. Langkah selanjutnya adalah bersama dengan masyarakat menjaga kelestariannya melalui cara sederhana, yaitu dengan mengurangi penggunaan plastik dan membuang sampah pada tempatnya. ••

* Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dan relawan Burung Laut Indonesia

** Komunitas Burung Laut Indonesia

Sosialisasi perlindungan burung laut. (Foto: Fransisca Noni T.)

Badan Restorasi Gambut (BRG). 2019. Rencana Restorasi Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023. Badan Restorasi Gambut (BRG). xiii + 159 pp.

Badan Restorasi Gambut (BRG). 2019. Rencana Tindakan Tahunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019: Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Medak – Sungai Lalah. Badan Restorasi Gambut (BRG). various pp.

Badan Restorasi Gambut (BRG). 2019. Rencana Tindakan Tahunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019: Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Musi. Badan Restorasi Gambut (BRG).



Cobbing, M. 2018. A Crisis of Convenience: The Corporations Behind The Plastic Pollution Pandemic. GREENPEACE, 45 pp.

Wasaraka, R.V. 2019. Perempuan Perkasa: Belajar praktik Kesetaraan Dalam

Wiratno, D. Indriyo, A. Syarifudin dan A. Kartikasari. 2004. Berkaca di Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelola Taman Nasional. The Gibbon Foundation Indonesia/PILI. xxxiii+338 pp.

Flora & Fauna Lahan Basah

..... sambungan dari halaman 19

Kekayaan Burung di Habitat Lahan Basah Tersisa di Jakarta Utara



Isap-madu Indonesia
(Foto-foto: Prayitno Goenarto)

Kokokan Laut

Blekok sawah

Itik benjut

Lokasi ini juga menarik untuk jenis burung migran. Pada saat survei, terpantau dua jenis burung migran yaitu jenis Trinil pantai dan Jalak cina. Pada musim puncak migrasi yang terjadi pada Agustus hingga Desember kemungkinan beberapa jenis burung migran mencari tempat untuk makan dan istirahat di lokasi ini. Berdasarkan hasil pengamatan di TWAAK oleh beberapa pengamat burung menemukan beberapa jenis burung migrasi lainnya seperti, Trinil semak *Tringa glareola* (Philip Chaon, September 2018), Kecici belalang *Locustella certhiola* (Enrico Leonardi, Januari 2016), Sikatan bubuk *Muscicapa dauurica* (Todd Pepper, November 2014),

dan Walet-palem asia *Cypsiurus balasiensis* (Mark Schellekens, Juni 2000) (Sullivan dkk. 2009). Satu jenis yang dianggap sebagai jenis yang kemungkinan lepas di lokasi ini yaitu jenis Isap-madu Indonesia *Lichmera limbata*. Persebaran jenis ini hanya di Bali dan Nusa Tenggara (Mackinnon dkk. 2010; Eaton dkk. 2016). Menurut Chng dkk. 2015, jenis ini termasuk salah satu jenis burung yang diperdagangkan di salah satu dari tiga pasar burung di Jakarta.

Komunitas burung dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan lingkungan serta dapat menggambarkan kondisi habitat atau sebagai bioindikator suatu

wilayah. Penurunan kualitas, modifikasi, dan hilangnya habitat merupakan ancaman penting terhadap jenis-jenis burung. Eksploitasi dan perubahan penggunaan lahan oleh manusia utama bagi kehidupan burung. Perubahan fungsi menjadi spot-spot kecil yang menyisakan ruang seperti habitat buatan untuk burung misalnya tambak atau sawah bisa dijadikan tempat untuk mencari makan. TWAAK yang juga menjadi salah satu habitat tersisa tentu penting untuk tetap dijaga kelestariannya. ••

* Pengamat burung asal Jakarta
** Staf BKSDA Jakarta

WETLANDS INTERNATIONAL

GLOBAL OFFICE

PO Box 471
6700 AL Wageningen
The Netherlands
post@wetlands.org
www.wetlands.org

INDONESIA

Jl. Bango No. 11
Bogor 16161
admin@wetlands.or.id
http://indonesia.wetlands.org

ISSN:
0854-963X

Foto Cover:

Sumber daya alam yang
dikaruniakan Sang Pencipta,
harus selalu kita syukuri
(Foto: Triana)

Warta Konservasi Lahan Basah (WKLB) adalah majalah yang diterbitkan oleh Yayasan Lahan Basah (Wetlands International) secara berkala setiap tiga bulan sekali (triwulan), dalam rangka mendukung pengelolaan dan pelestarian sumberdaya lahan basah di Indonesia. WKLB diterbitkan untuk mewadahi informasi-informasi seputar perlahanbasahan di Indonesia yang disampaikan oleh berbagai kalangan baik secara individu maupun kolektif. Diharapkan media WKLB ini dapat turut berperan dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola lahan basah secara bijak dan berkesinambungan.



Wetlands International



@WetlandsInt



Wetlands International



Wetlands

INTERNATIONAL

Yayasan Lahan Basah (YLBA)

Pencetakan warta ini didanai oleh program *Partners for Resilience Strategic Partnership (PFRSP)*



PARTNERS FOR RESILIENCE

Jumlah kejadian bencana alam dan bencana akibat kelalaian manusia telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir ini. Selain itu, perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan juga semakin meningkatkan risiko bencana terutama bagi kalangan miskin yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Oleh karenanya, diperlukan sebuah pendekatan pengelolaan risiko bencana yang terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim yang semakin meningkat.

Di Belanda, *Partners for Resilience Strategic Partnership (PFRSP)* merupakan sebuah aliansi yang terdiri lima organisasi yakni CARE Netherland, Cordaid, the Netherlands Red Cross, the Red Cross Red Crescent Climate Centre dan Wetlands International yang bersama-sama mengembangkan program kemitraan strategis, untuk mendorong penerapan pengelolaan resiko yang terintegrasi / *Integrated Risk Management (IRM)* mulai dari tingkat global hingga di tingkat lokal. IRM merupakan sebuah pendekatan pengelolaan risiko bencana yang menggabungkan 3 pendekatan yakni pengurangan resiko bencana (DRR), adaptasi perubahan iklim (CCA) dan restorasi dan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan (ERM). Ketiga pendekatan ini digunakan untuk mendorong penerapan IRM dalam domain kebijakan, praktek dan investasi.

Di Indonesia, PFRSP beranggotakan 5 organisasi yang masing-masing merupakan perwakilan dari organisasi yang beraliansi di tingkat global. Kelima organisasi tersebut antara lain CARE International Indonesia, the Indonesian Red Cross (Palang Merah Indonesia), Yayasan Lahan Basah (Wetlands International), Karina KWI Yogyakarta dan the Red Cross Climate Centre. Kelima organisasi ini berkolaborasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat Indonesia dengan mendorong implementasi IRM, yang dielaborasi kedalam 5 lintasan kerja. Masing-masing lintasan kerja dipimpin oleh satu organisasi.

Yayasan Lahan Basah (Wetlands International) menjadi salah satu anggota aliansi PFRSP Indonesia yang memimpin kegiatan lobby dan advokasi IRM di lintasan kerja/trajectory 4. Lintasan ini bertujuan untuk mendorong penerapan IRM didalam rencana investasi pembangunan *lowlands ecosystem* yang bijaksana dan berkelanjutan (khususnya kawasan ekosistem mangrove dan gambut).